

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenanjung Korea, yang saat ini terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, dahulunya merupakan satu negara yang diduduki oleh Jepang. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu di akhir Perang Dunia II, sebagai bagian dari kesepakatan, wilayah Korea yang merupakan wilayah jajahan Jepang dibagi menjadi dua zona pendudukan, Zona Utara dan Zona Selatan. Zona Utara, yang saat ini dikenal sebagai Korea Utara, saat itu dikuasai oleh Uni Soviet. Sedangkan Zona Selatan, yang saat ini dikenal sebagai Korea Selatan, saat itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Awalnya, pemisahan wilayah Korea menjadi dua zona pendudukan ini dilakukan untuk mengontrol sementara wilayah Korea, sekaligus mempersiapkan kemerdekaan Korea. Namun, perpecahan dan perselisihan politik yang telah terjadi antara kedua Zona membuat rencana tersebut menjadi gagal (Rukmo, 1983, 153).

Pada tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 antara Blok Poros dan Blok Sekutu, yang juga melibatkan Uni Soviet dan Korea Utara, kedua zona pendudukan tersebut secara resmi memproklamkan pendirian negara. Zona pendudukan utara secara resmi berganti menjadi Korea Utara yang didirikan pada tanggal 09 September 1948 dengan Ibukota di Pyongyang. Sedangkan zona pendudukan selatan secara resmi berganti menjadi Korea Selatan yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1945 dengan Ibukota di Seoul. Kedua negara tersebut menganut ideologi yang berbeda. Korea Utara dipimpin oleh Kim Il Sung yang dengan sistem pemerintahan yang sosialis. Sedangkan Korea Selatan dipimpin oleh Syngman Rhee dengan sistem pemerintahan kapitalis. Perbedaan ideologi tersebut memperburuk hubungan kedua negara, sehingga pada tahun 1950, Korea Utara melakukan penyerangan ke Korea Selatan dan memulai Perang Korea yang berlangsung hingga tahun 1953. Berakhirnya Perang Korea ditandai dengan adanya gencatan senjata dan tanpa perjanjian perdamaian (Rukmo, 1983, 154-156).

Sejak berakhirnya Perang Korea di Tahun 1953 hingga awal pemerintahan Presiden Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan ke-12 di Tahun 2017, Ketegangan dan Konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara terus terjadi. Salah satu peristiwa yang paling dikenal adalah pertempuran di Pulau Yeonpyeong pada tahun 1999 dan tahun

2010. Pada Tahun 1999, telah terjadi pertempuran di Pulau Yeonpyeong antara Korea Utara dan Korea Selatan, dengan korban jiwa paling banyak berasal dari pihak Korea Selatan. Kemudian, pada tahun 2010, Korea Utara melakukan penyerangan artileri ke Pulau Yeonpyeong, sehingga sekali lagi menimbulkan banyak korban jiwa dan militer dari pihak Korea Selatan. Selain pertempuran yang terjadi, pengembangan program senjata nuklir disertai dengan uji coba rudal balistik dan senjata nuklir juga menjadi salah satu alasan yang memperburuk hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, hal ini dikarenakan hal-hal yang dilakukan oleh Korea Utara melanggar resolusi PBB dan menimbulkan ketegangan di Kawasan, juga menjadi ancaman keamanan bagi Korea Selatan dan negara-negara lainnya (Macfie, 2010).

Menanggapi situasi tersebut, sikap Pemerintah Korea Selatan terhadap isu Semenanjung Korea sangat bergantung pada pilihan yang diambil oleh Presiden selaku pembuat kebijakan. Pada era Presiden Kim Dae Jung dan dilanjutkan di era Presiden Roh Moo Hyun, Untuk mengurangi ketegangan, upaya reunifikasi melalui kebijakan *Sunshine Policy* dijalankan. Kebijakan *Sunshine Policy* adalah kebijakan yang dibuat oleh Presiden Korea Selatan ke-8 Kim Dae Jung pada tahun 1998 sebagai upaya reunifikasi Korea. Kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara melalui dialog dan kerjasama ekonomi. Keberhasilan dari kebijakan ini ditandai dengan diselenggarakannya *The Inter-Korean Summit* pada Tahun 2000. Pada konferensi ini, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il, dan Pemimpin Korea Selatan, Kim Dae Jung, menandatangani *South-North Joint Declaration*, yang berisi kesepakatan untuk mempromosikan rekonsiliasi, kerja sama, dan reunifikasi di Semenanjung Korea (Safitri, 2019).

Kebijakan *Sunshine Policy* kemudian kembali dilanjutkan oleh Presiden Roh Moo Hyun, namun kebijakan ini mengalami kegagalan dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Korea Selatan. Kepercayaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Presiden Roh Moo Hyun kepada Korea Utara menyebabkan ketimpangan pada hubungan kedua negara dan menyebabkan Korea Selatan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada Oktober 2006, Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk menangguk bantuan dan pasokan yang diberikan ke Korea Utara, sebagai respon dari gagalnya kebijakan ini dan tindakan uji coba nuklir serta peluncuran rudal yang mengancam keamanan Korea

Selatan. Pada akhir pemerintahan Presiden Roh Moo Hyun, kebijakan ini kemudian dihentikan bersamaan dengan beralihnya pemerintahan(Sari, 2020).

Berbeda dengan dua Presiden terdahulu yang lebih memilih jalan yang lebih kooperatif dalam menanggapi isu Semenanjung Korea, Presiden selanjutnya, Lee Myung Bak dan Park Geun Hye, dikenal sebagai Presiden yang mengambil jalan yang konservatif dalam menanggapi isu Semenanjung Korea. Berbeda dengan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun, dalam menanggapi isu Semenanjung Korea, Presiden Lee Myung Bak memilih untuk tidak melanjutkan kebijakan dari Presiden sebelumnya, hal ini dikarenakan Presiden Lee melihat tidak ada perkembangan signifikan dari *Sunshine Policy* terhadap isu Semenanjung Korea. Lee Myung Bak memilih untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengiriman bantuan ke Korea Utara, selain itu dalam menanggapi isu Semenanjung Korea, Lee Myung Bak juga berusaha untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang militer dengan Amerika Serikat sebagai upaya untuk menciptakan wilayah Semenanjung Korea yang bebas dari ancaman nuklir, sekaligus demi keamanan Korea Selatan (Kim, 2015).

Di era Presiden selanjutnya, Presiden Park Geun Hye, di awal pemerintahannya, Park Geun Hye menerapkan kebijakan *Trust Building Process*. Inti dari kebijakan ini adalah untuk membantu Korea Utara maju dengan meninggalkan program nuklirnya melalui berbagai upaya kerjasama, yang paling utama adalah kerjasama ekonomi. Trust Building Process mencerminkan keseimbangan kerjasama dan kebijakan tegas terhadap provokasi yang nantinya mungkin akan terjadi di Semenanjung Korea. Kebijakan *Trust Building Process* tidak dapat dijalankan sampai selesai dikarenakan pihak Korea Utara yang melanggar isi kebijakan tersebut. Imbas dari masalah tersebut akhirnya membuat Park Geun Hye mengambil sikap tegas dengan memutuskan berbagai upaya damai Korea Selatan dan Korea Utara, serta tidak ingin lagi menjalin hubungan apapun dengan Korea Utara. Pemutusan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara di era Presiden Park Geun Hye juga ditandai dengan ditutupnya *Kaesong Industrial Complex* (KIC), dimana kompleks industrial ini dibentuk untuk membantu reformasi perekonomian Korea Utara, Park Geun Hye juga memutuskan dan menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korea Utara sebagai bentuk pemutusan hubungan kerjasama antara kedua Negara (Teo, 2014).

Pada tahun 2017, ketika pergantian kepemimpinan dari Presiden Park Geun Hye ke Presiden Moon Jae In, terdapat perubahan pola sikap yang diambil oleh Pemimpin Korea Selatan, yang sebelumnya lebih memilih mengambil sikap tegas menjadi lebih kooperatif. Moon Jae In merupakan Presiden Korea Selatan ke-12 yang berasal dari Partai Liberal Korea, sehingga hal ini tentu mempengaruhi sikap Moon Jae In dalam menanggapi hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Sepanjang masa kepemimpinannya, Moon Jae In lebih menekankan pada penggunaan tindakan-tindakan *soft power* dalam menanggapi Korea Utara. Pada era kepemimpinan Presiden Moon Jae In, Korea Selatan menunjukkan sikap dalam melihat Korea Utara bukan lagi sebagai lawan, tetapi sebagai kawan yang potensial jika Korea Utara berusaha untuk membuka lebar dialog atas perwujudan rekonsiliasi di Semenanjung Korea. Pada pidato kepresidenannya yang pertama, Moon Jae In mengungkapkan bahwa dia tidak menginginkan kehancuran atas Korea Utara, melainkan ingin terjadinya resolusi konflik antara Korea perlu dilakukan secara damai dan demokratis (Lee & Botto, 2018, 7-10).

Salah satu kebijakan yang berhasil dilakukan melalui pendekatan *soft power* di era Presiden Moon Jae In adalah Pertemuan Tingkat Tinggi antara kedua Pemimpin Negara yang dikenal *Panmunjom Declaration*. Pada tanggal 27 April 2018, dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Antara-Korea yang diadakan di "*Peace House*" Panmunjom, Korea Selatan dan Korea Utara menyepakati Deklarasi Panmunjom atau yang juga dikenal sebagai *Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Korean Peninsula*. Penandatanganan deklarasi ini dilakukan oleh Moon Jae In sebagai perwakilan Korea Selatan dan Kim Jong Un sebagai perwakilan Korea Utara. Nama "*Panmunjom Declaration*" diambil dari lokasi penandatanganan, yaitu Desa Panmunjom. Dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk membangun komitmen perdamaian di Semenanjung Korea, secara resmi mengakhiri perang, serta meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara melalui upaya denuklirisasi di Semenanjung Korea (Rahmawati, 2021, 1-2).

Sikap Presiden Moon Jae In terhadap Korea Utara yang lebih berorientasi pada perdamaian melalui kerjasama dan negosiasi menggambarkan bagaimana Moon Jae In memilih arah kebijakan luar negeri Korea Selatan di era pemerintahannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, yang menjadi menarik adalah bagaimana upaya negosiasi berupa kebijakan dalam menanggapi isu Semenanjung Korea yang dibentuk di era Moon Jae In

mencerminkan cara yang berbeda yang dipilih oleh pemimpin Korea Selatan sebelumnya dalam menanggapi isu tersebut, hal tersebut juga menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi individu setiap Presiden Korea Selatan dalam mengambil kebijakan terkait isu Semenanjung Korea. Faktor individu tersebut dapat dikenal sebagai faktor idiosinkratik. Tulisan ini ingin mengkaji sikap Moon Jae In terhadap Korea Utara yang direpresentasikan melalui *Panmunjom Declaration* dengan menggunakan level analisis individu. Diskusi dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai faktor idiosinkratik apa yang meletakbelakangi terbentuknya *Panmunjom Declaration* yang dapat dijelaskan dari perspektif individu Moon Jae In.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, karena Presiden Moon Jae In mencerminkan cara yang berbeda dengan Presiden sebelumnya dalam menanggapi isu tersebut, skripsi ini ingin mengkaji dari perspektif individu Moon Jae In, sehingga skripsi ini akan mengajukan pertanyaan "**Apa faktor idiosinkratik yang meletakbelakangi Moon Jae In untuk membentuk *Panmunjom Declaration*?**"

C. Kerangka Teori

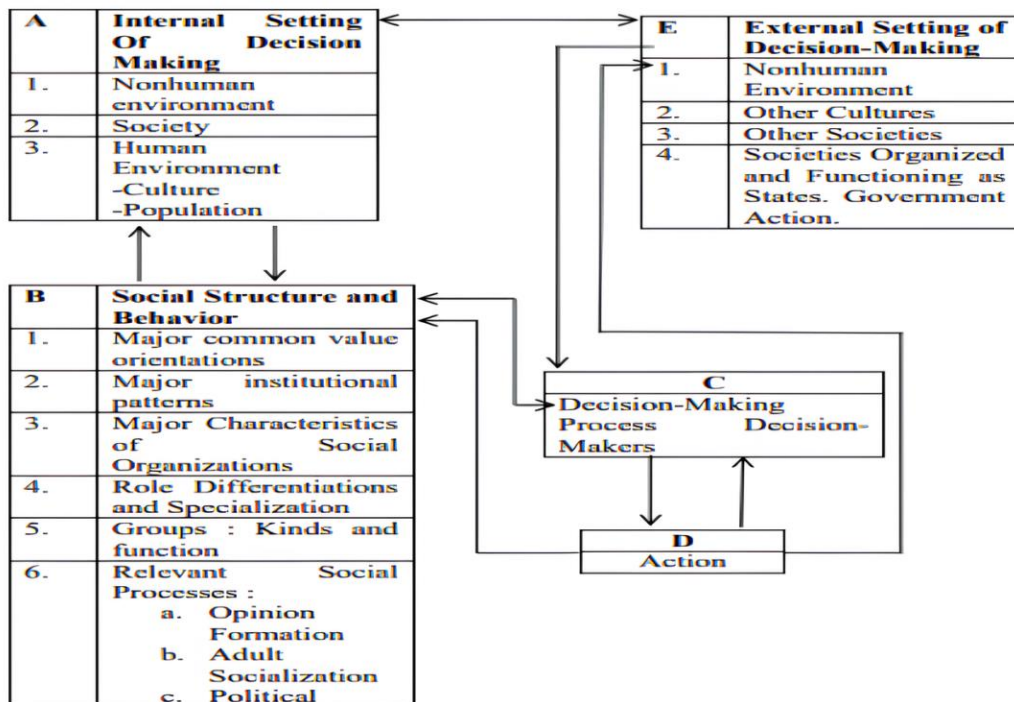
1) Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri

Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah, penulis menggunakan Teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri milik Richard Synder. Teori Synder, yang dikenal sebagai model pembuat keputusan (*decision making*), menegaskan bahwa perilaku politik luar negeri suatu Negara dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Bagan dibawah menunjukkan bahwa proses perumusan suatu kebijakan luar negeri bersifat kompleks dan bahwa nilai kebijakan luar negeri berasal dari faktor *setting* internal dan eksternal. Bagan A merupakan *setting* internal untuk pengambilan keputusan (*decision making*), yang di dalamnya terdapat beberapa faktor seperti lingkungan, batas teritori dan sumber daya alam, masyarakat, adat dan kebudayaan. Bagan B merupakan *social structure and behavior*, yang di dalamnya terdapat beberapa faktor seperti nilai-nilai umum, pola utama

kelembagaan, kelompok kepentingan serta opini publik, bagan A dan B, keduanya merupakan bagian dari faktor internal. Sedangkan bagan E menunjukkan faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan, budaya, pemerintah, dan masyarakat Negara lain, serta organisasi atau masyarakat internasional. Bagan A, B, dan E inilah yang mempengaruhi para *decision makers*, dimana *output* dari rangkaian proses tersebut adalah sebuah kebijakan (Rosyidin, 2011).

Gambar 1.1 Bagan Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri



Dalam skripsi ini, Bagan A (*Internal Setting of Decision Making*) yang mempengaruhi Moon Jae In berasal dari lingkungan manusia disekitarnya (Human Environment), bagan B (*Social Structure and Behavior*) yang mempengaruhi Moon Jae In berasal dari unsur-unsur yang membentuk idiosinkratik (dijelaskan pada subbab selanjutnya) Moon Jae In dan dukungan masyarakat terhadap Moon Jae In (*Opini Formation*), sedangkan pada bagan E (*external Setting of Decision Making*) berasal dari hubungan Korea Selatan dan negara lain. Pada *faktor internal setting of decision making*, *human environment* merujuk pada kondisi domestik Korea Selatan. Kebijakan kooperatif yang dijalankan Moon Jae In terhadap Korea Utara, terbukti menguntungkan situasi domestik Korea Selatan, misalnya setelah pelaksanaan *Panmunjom Declaration*, bursa saham Korea Selatan mengalami

peningkatan yang sebelumnya menurun disebabkan karena adanya uji coba senjata nuklir Korea Selatan. Selain peningkatan dalam bidang ekonomi, kebijakan kooperatif yang dibentuk oleh Moon Jae In juga meningkatkan stabilitas keamanan baik dalam maupun luar negeri Korea Selatan, terutama sepeninggalan Presiden Park Geun Hye (Allens, 2020).

Beberapa faktor mempengaruhi Moon Jae In dalam bagan *Social Structure and Behavior*, yakni unsur pembentuk idiosinkratik Moon Jae In dan *Opini Formation*. Unsur pembentuk idiosinkratik Moon Jae In merujuk pada latar belakang sosial (*Adult Socialization*) yang dimiliki oleh Moon Jae In, misalnya fakta bahwa dia lahir dalam bayang-bayang Perang Korea dan kedekatannya dengan Presiden Roh Moo Hyun, pertemanan yang dijalin oleh Moon Jae In dan Roh Moo Hyun, sedikit banyak mempengaruhi pemikiran keduanya terhadap Korea Utara, sehingga kebijakan yang dibentuk oleh keduanya saat menjabat sebagai Presiden Korea Selatan juga memiliki beberapa kesamaan (BBC News, 2018). Selain itu, keanggotaan Moon Jae In dalam Partai Demokrat Korea (*Major Institutional Patterns*) juga mempengaruhi Moon Jae In dalam membentuk *Panmunjom Declaration*, lingkungan Partai sangat mempengaruhi persepsi Moon Jae In dalam menentukan arah kebijakannya terhadap Korea Utara. Moon Jae In berasal dari Partai Minjoo yang merupakan Partai Demokrat Korea, Partai Minjoo terkenal cenderung demokratis dan moderat karena partai tersebut berpegang pada nilai-nilai kebebasan, persamaan, kerjasama, dan perdamaian. Partai Minjoo terkenal mendukung normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selain Moon Jae In, Presiden Korea Selatan lainnya seperti Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun juga berasal dari Partai Minjoo (Hahm & Heo, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi Moon Jae In dalam Bagan B ini adalah *Opini Formation* yang berasal dari dukungan masyarakat Korea Selatan terhadap kebijakan kooperatif yang dibentuk oleh Moon Jae In. meningkatnya perekonomian dan bursa saham Korea Selatan, serta situasi keamanan dalam negeri yang lebih terjaga, berhasil mengubah persepsi Masyarakat Korea Selatan terhadap Korea Utara dan meningkatkan dukungan masyarakat Korea Selatan atas kebijakan kooperatif Moon Jae In terhadap Korea Utara. Sedangkan, pada Bagan E mengenai faktor external yang mempengaruhi berasal dari hubungan luar negeri antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan Korea Utara. Di bawah

pemerintahan Presiden Trump, loyalitas yang terjalin antara Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin berkurang, terutama dalam bidang keamanan. Trump membatasi dan memotong anggaran pelatihan militer gabungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, hal tersebut berdampak pada hubungan yang telah terjalin antara Amerika Serikat dan Korea Selatan selama bertahun-tahun. Penurunan hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dimanfaatkan oleh Moon Jae In untuk menarik hati Korea Utara demi terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea, mengingat salah satu faktor sulitnya menjalin hubungan dengan Korea Utara dipengaruhi oleh kedekatan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Kebijakan kooperatif yang ditawarkan oleh Moon Jae In terhadap Korea Utara disambut dengan sangat baik oleh Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Respon baik yang diberikan oleh Korea Utara tersebut menjadi permulaan dari kebijakan kooperatif yang dibentuk oleh Moon Jae In terhadap Korea Utara, termasuk *Panmunjom Declaration*.

menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah, Teori pengambilan kebijakan luar negeri milik Snyder membantu menjelaskan mengenai pentingnya memahami peran serta karakteristik individu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Teori milik snyder ini menekankan bahwa faktor-faktor internal, eksternal, struktur dan sosial sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Dalam teori pengambilan kebijakan luar negeri milik Snyder, Snyder menaruh *Decision-maker* sebagai aktor utama yang menyebabkan bagaimana suatu kebijakan luar negeri dapat dibuat. Sehingga sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi individu *decision-maker* dalam membentuk sebuah kebijakan luar negeri, dengan begitu dapat menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah. Berdasarkan pada penjelasan diatas, unsur-unsur pembangun idiosinkratik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Moon Jae In dalam membentuk sebuah kebijakan luar negeri. Walaupun terdapat faktor lain yang mempengaruhi, pengaruh dari idiosinkratik seorang individu pemimpin tidak dapat dikesampingkan. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan mengenai model teori idiosinkratik, dimana dalam subbab tersebut, faktor idiosinkratik yang mempengaruhi individu seorang pemimpin akan dijelaskan lebih mendetail

2) Model Teori Idiosinkratik

Pendekatan konvensional dalam hubungan internasional seringkali tidak dapat menangani tingkah laku aktor politik yang bertindak dan mengambil kebijakan. Psikologi politik membantu menjelaskan ilmu politik dan ilmu psikologi tentang perilaku politik. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian para pemimpin politik dengan menggunakan ilmu psikologi saat menganalisis dunia politik. Ini pasti akan membantu peneliti memahami latar belakang pemimpin tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam buku *Introduction of Political Psychology* oleh Martha Cottam, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda dan unik, baik faktor internal maupun eksternal memengaruhi karakter setiap orang. Psikologi politik mengacu pada individu sebagai tingkat analisis tentang latar belakang atau alasan di balik perilaku suatu Negara. Hal ini dikarenakan kebijakan atau perilaku suatu Negara sangat berhubungan erat dengan pengambil keputusan sehingga psikologis pengambil keputusan tersebut berpengaruh terhadap kebijakan atau perilaku Negara. Pemimpin negara memiliki otoritas untuk mengatur kebijakan dan perilaku negara. Beberapa faktor psikologis yang dimiliki oleh para pemimpin Negara, seperti kepentingan, identitas, kepribadian, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin tersebut, dapat memengaruhi kebijakan dan tindakan negara tersebut (Cottam, 2004).

Salah satu model analisis yang memengaruhi aktor dan individu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan internasional adalah teori idiosinkratik. Dalam analisis model teori idiosinkratik, atau persepsi elit, faktor yang menjelaskan sesuatu yang melekat pada individu (pemimpin), seperti kepribadian, gaya kepemimpinan, dan tipe pemimpin. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara seseorang melihat masalah dan pengambilan keputusan. Teori idiosinkratik adalah tingkat analisis paling dasar dalam hubungan internasional karena bagaimana sistem internasional, negara, dan masyarakat dapat terbentuk tidak terlepas dari individu yang menyusunnya. Ini jelas bahwa idiosinkratik memainkan peran penting dalam keberasaan politik luar negeri. Untuk menganalisis isu dalam tulisan ini, penulis menggunakan indikator berdasarkan pada model Alex Mintz dan Karl DeRouen dalam bukunya yang

berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*”- Chapter 6 (*Psychological Factors Affecting Foreign Policy Decisions* (Mintz, 2010).

Korea Selatan merupakan Negara dengan sistem Republik Presedensial yang dipimipin oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, hal ini berarti bahwa semua kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Korea Selatan akan dipengaruhi oleh Presiden (Han, 2019). Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik pemimpin tersebut, termasuk dalam kebijakan luar negeri yang diambil oleh Moon Jae In untuk membentuk *Panmunjom Declaration*. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis menggunakan faktor idiosinkratik Moon Jae In yang mempengaruhi mengapa membentuk kebijakan tersebut. Penulis akan menggunakan tiga indikator penting yang dimasukkan Alex Mintz dan Karl DeRouen ke dalam bukunya mengenai model teori idiosinkratik.

a. Kepribadian Pemimpin (Leader’s Personality)

Menurut David Winter, ketika seseorang berhadapan dengan emosinya, kepribadiannya membentuknya. Kepribadian seseorang didefinisikan sebagai integrasi proses yang berpola individual dari persepsi, ingatan, penilaian, pencarian, tujuan, dan ekspresi, serta regulasi emosional. Winter mengatakan bahwa ada empat komponen penting dalam kepribadian seseorang: tempramen, kognisi, motif, dan konteks sosial. Tempramen mengacu pada aspek perilaku yang dapat diamati, seperti tingkat energi dan neurosis, sedangkan konteks sosial mencakup hal-hal seperti gender, ras, kelas, budaya, etnis, dan generasi. Kognisi mengacu setiap faktor berkaitan dengan kepercayaan, nilai, dan perilaku. Terakhir, motif mencakup tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme untuk melindungi diri.

Moon Jae In merupakan pemimpin yang strategis dan visioner dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Moon Jae In memiliki karakter kepemimpinan yang fleksibel, responsif, inovatif, berani mengambil keputusan, belajar dari pengalaman, dan berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan organisasi dan Negara lain. Karakter yang

dimiliki oleh Moon Jae In dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, pendidikan dan karir.

b. Gaya Kepemimpinan (Leadership Style)

Analisis gaya kepemimpinan Presiden membantu kita memahami mengapa seorang Presiden membuat keputusan tertentu dan tidak mengambil tindakan lain. Mintz kemudian membagi berbagai gaya kepemimpinan menjadi beberapa jenis:

- 1) *Goal-driven vs Context-driven*, Pemimpin dengan tipe *goal-driven* biasanya tidak terbuka terhadap informasi baru dan cenderung lebih menantang kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan luar negeri, sedangkan pemimpin dengan tipe *context-driven* biasanya lebih terbuka dan cenderung mencari informasi baru.
- 2) *Task-oriented vs Task-motivated*, tipe pemimpin *task-oriented* cenderung tidak mungkin mengubah ideologi atau posisi mereka. Sebaliknya, tipe pemimpin *task-motivated* cenderung kurang membutuhkan koalisi yang luas di dalam dan luar negeri sebelum mengambil tindakan untuk mempertahankan kebijakan.
- 3) *Task-oriented vs context-oriented*, memiliki perbedaan yang dianggap penting yaitu kapasitas sensitivitas terhadap konteks politik. Pemimpin yang *task-oriented* tidak terlalu peduli dengan konteks politik. Sebaliknya, pemimpin yang *context-oriented* berbeda. Dalam menganalisa gaya kepemimpinan keduanya, dapat dilihat dengan a) apakah pemimpin menerima hambatan politik; b) ingin tahu tentang informasi baru; dan c) apakah mereka fokus pada masalah atau pada hubungan saat memeriksa gaya kepemimpinan yang berpusat pada tugas dan konteks.

Dalam gaya kepemimpinan, Moon Jae In masuk pada tipe pemimpin yang berorientasi pada tugas (*task-oriented*). Hal ini dapat dilihat dari keteguhan Moon Jae In dalam memandang isu Semenanjung Korea saat masih menjadi 'orang' Roh Moo Hyun dan menjadi Presiden Korea Selatan, sejak dulu Moon Jae In selalu berupaya untuk menggunakan tindakan-tindakan negosiasi dalam menyelesaikan isu Semenanjung Korea.

c. Tipe-tipe Pemimpin

- 1) *Crusader*, seorang pemimpin yang tertutup akan informasi baru tetapi menantang batas politik. Pemimpin seperti ini tidak membatasi diri mereka dalam mencapai tujuan mereka. Jenis ini terbagi menjadi dua kelompok: *expansionist* dan *evangelist*. Pemimpin *expansionist* biasanya menggunakan agresifitas untuk mencapai tujuannya karena mereka memiliki karakteristik berikut: kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan, kebutuhan yang rendah akan alternatif kebijakan lain, rasa nasionalisme yang tinggi, dan kurangnya persahabatan. *Evangelist*, di sisi lain, lebih nyaman dengan hubungan pertemanan dan memengaruhi tujuan mereka dengan cara yang tidak berbeda dengan gaya *evangelist*.
- 2) *incremental*. Pemimpin terbuka untuk informasi (dan oleh karena itu strategis), menghadapi tantangan atau batasan, dan berkonsentrasi pada manuver dalam hal motivasi.
- 3) *Charismatic*. Pemimpin juga menginginkan hubungan yang terbuka dan menantang (juga strategis), tetapi dalam hal motivasi, berfokus pada hubungan dengan mendorong orang lain untuk bertindak.
- 4) *Strategic*. Pemimpin strategis memiliki sifat yang menantang batasan tetapi membuka dirinya untuk informasi. Pemimpin dalam tipe ini mengetahui apa yang ia inginkan dan akan mencari informasi untuk mencapai tujuannya. Secara politis, memiliki keberanian namun tetap berhati-hati dalam mewujudkan aspirasi ambisius yang dimilikinya.
- 5) *Pragmatic*. Pemimpin menghargai kendala politik yang tertutup pada informasi. Tipe ini dibagi lagi menjadi empat jenis lainnya: Direktif dan Konsultatif (Direktif dan Konsultatif). Kedua jenis ini mengikuti peraturan politik tetapi tertutup terhadap informasi yang diterima. Akibatnya, aktor-aktor ini cenderung mengarahkan diskusi kebijakan yang sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Ketika dihadapkan pada tantangan politik, seorang pemimpin direktif harus berfokus pada masalah. pemimpin konsultatif, di sisi lain, lebih berfokus pada hubungan dan akan berhati-hati melacak peran elit lainnya. Reaktif dan Akomodatif Meskipun motivasi mereka untuk bertindak berbeda, kedua tipe ini memiliki persamaan: mereka menghargai batasan dan terbuka terhadap informasi. Pemimpin reaktif lebih

suka fokus pada masalah yang terjadi saat membuat keputusan kebijakan di luar negeri. Ini dicapai dengan menentukan berbagai opsi, menentukan apakah konstituensi politik akan diterima, dan menangani setiap masalah dengan mempertimbangkan opsi yang sesuai dengan politik. sementara jenis akomodatif berkonsentrasi pada membangun hubungan baik dengan negara lain atau dikenal sebagai bride-builders, yang berusaha mencapai kesepakatan dan meningkatkan tanggung jawab.

Moon Jae In termasuk tipe pemimpin *strategic*. Moon Jae In memiliki ambisi untuk membangun hubungan yang lebih damai antara Korea Selatan dan Korea Utara, Moon tau apa yang dia inginkan dan berusaha untuk mewujudkan keinginannya dengan menggunakan cara yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya, namun tetap berhati-hati.

D. Hipotesa

Berdasarkan pada penjelasan yang ada pada kerangka teori, faktor idiosinkratik dominan yang melatarbelakangi Moon Jae In dalam membentuk kebijakan *Panmunjom Declaration* adalah **Kepribadian pemimpin (Leader's Personality) yang dimiliki oleh Moon Jae In.**

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dari definisi tersebut, yakni cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Di dalam bukunya, Sugiyono menjelaskan dua metode yang digunakan dalam penelitian, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang mana metode ini digunakan untuk meneliti mengenai sampel atau populasi tertentu, pengumpulan data pada metode ini menggunakan instrumen penelitian, dengan analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

post-positivisme, metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana instrumen kunci dalam metode penelitian ini adalah peneliti, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), dengan analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam penulisan ini berupa kata-kata, ataupun gambar, bukan dengan angka-angka. Jenis data yang dipakai dalam penulisan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan dokumenter mengenai objek penelitian melalui buku, jurnal, website, dan media massa lainnya yang relevan, Kemudian, dalam menghimpun data, penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang difokuskan pada data-data pustaka yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang baik (Sugiyono, 2010).

F. Tujuan Penelitian

Penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan dan memaparkan lebih spesifik mengenai bagaimana faktor idiosinkratik yang dimiliki oleh Moon Jae In melatarbelakangi Moon Jae In untuk membentuk kebijakan *Panmunjom Declaration* sebagai salah satu upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam menjawab pertanyaan dan memaparkan tersebut didasarkan pada teori yang digunakan dan dapat dibuktikan dengan data yang valid.

G. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian dalam penulisan ini adalah dari Tahun 2017-2018. Tahun 2017 adalah tahun dimana Moon Jae In memulai kepemimpinannya sebagai Presiden Korea Selatan, dan pada tahun 2018 tepatnya pada bulan April, *Panmunjom Declaration* digelar di Desa Panmunjom di daerah perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Penelitian ini akan membatasi diskusi pada level analisis individu, yang akan lebih banyak mengkaji tentang aspek-aspek yang mempengaruhi sikap dan keputusan yang diambil oleh Moon Jae In.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penulisan, sistematika dalam penulisan ini terbagi dalam empat bab yang saling berhubungan dalam menjawab pertanyaan dalam penulisan ini, yaitu Bab I yang berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah meliputi Sejarah Korea beserta perkembangan Kebijakan Reunifikasi Korea hingga ke Era Presiden Moon Jae In, rumusan masalah, kerangka teori menggunakan teori kebijakan luar negeri, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II akan mengenai latar belakang konflik Semenanjung Korea, dinamika politik luar negeri Korea Selatan dari era Presiden Kim Dae Jung hingga Presiden Moon Jae In dan *Panmunjom Declaration* sebagai solusi menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea yang dibentuk oleh Moon Jae In

Bab III akan membahas mengenai faktor idiosinkratik dominan yang melatarbelakangi Moon Jae In untuk membentuk *Panmunjom Declaration* sebagai salah satu upaya perdamaian di Semenanjung Korea, yakni faktor kepribadian pemimpin (Leader's Personality).

Kemudian Bab IV berisi pembahasan akhir yakni kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada pembahasan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi Moon Jae In memebentuk kebijakan *Panmunjom Declaration*.